

Lokasi Kebudayaan Sunda

Oleh HAWE SETIAWAN

(*Pikiran Rakyat*, Minggu, 27 Desember 2009)

*diteundeun di jalan gede
dibuka ku nu ngaliwat*

LAGU lama masih terdengar di zaman baru. Kesan seperti itu pasti muncul jika orang menyimak, hingga batas tertentu, isu kebudayaan lokal setahun terakhir.

Silang pendapat tentang kepatutan jaipongan, yang mengiringi kemunculan Ahmad Heryawan, seakan mengulangi etiket zaman Aang Kunaefi. Keinginan puluhan orang, yang berkumpul di Subang, untuk mengganti nama “Jawa Barat” dengan “Pasundan” seolah mengulangi usulan Kongres Pemuda Sunda pada 1950-an. Bahkan ratapan tentang hari depan bahasa Sunda sudah terdengar, setidaknya, sejak abad ke-19.

Tiadakah dinamika? Nanti dulu. Isunya memang lama, tapi konteksnya baru. Inilah zaman pasca-Soeharto ketika inisiatif daerah melimpah ruah. Domain-domain politik membelah diri bagai amoeba. Raja-raja kecil bermunculan seperti seperti bintang sinetron. Apa yang dulu dihindari sebagai tabiat “provinsialistis” atau “kedaerahan” kini justru ditonjolkan.

Simbol-simbol kedaerahan dicari, digali, dan dibikin lagi. Di pelataran parkir Kampung Naga, atas inisiatif seorang petinggi polisi, berdiri Monumen Kujang Pusaka yang, ironisnya, dibuat dari peleburan 900 kujang pusaka. Bentuk kujang juga bertengger di pucuk-pucuk tiang bendera di Kabupaten Purwakarta. Adapun Bupati Eep Hidayat mengharuskan seluruh pegawai Kabupaten Subang mengenakan pakaian seragam mirip busana Kanekes seminggu sekali.

Budaya Sunda---apapun artinya---tampak dijadikan variabel penting dalam kepemimpinan politik. Bupati Don Murdono hendak menjadikan Sumedang sebagai “*puseur* budaya Sunda” melalui sebuah perda. Adapun Wakil Gubernur Dede Yusuf hendak memprakarsai produksi film cerita tentang “Perang Bubat”.

Primordialisme dalam budaya tampak sejajar dengan gejala lain yang tak kurang hebatnya, yakni fundamentalisme dalam agama. Ada kalanya kedua gejala ini berbenturan. Pertemuan MUI se-Jawa dan Lampung di Serang, Banten, dikabarkan melahirkan fatwa yang mengharamkan pertunjukan *debus* karena pertunjukan itu dianggap menyimpang dari “tarekat Arafaiyah”. Sebaliknya, dari komunitas Sunda yang terobsesi nilai-nilai zaman pra-Islam, belakangan timbul kecenderungan untuk menarik garis diametral di antara “Sunda” dan “Islam”.

Istilah Tariq Ali---dari konteks lain lagi---kiranya bisa dipakai di sini. Itulah “benturan antarfundamentalisme” (*the clash of fundamentalisms*). Boleh jadi, gejala seperti ini merupakan konsekuensi tersendiri dari politik identitas yang belakangan cenderung mengeras.

Kecenderungan seperti ini jadi ruwet manakala politik mengandalkan etnisitas sebagai pijakannya. Usulan sekelompok orang yang meminta “jatah” kursi menteri atau kedudukan tinggi lainnya kepada rezim Yudhoyono dengan mengedepankan klaim representasi kesundaan barangkali merupakan gejala khas zaman reformasi.

Betapapun, di luar riuh rendah panggung opini publik, sepertinya ada yang belum berubah dalam budaya politik. Isu kesundaan seringkali dimunculkan

bukannya sebagai desakan untuk merumuskan strategi kebudayaan, melainkan sekadar kerewelan demi terselenggaranya pesta kangen-kangenan di antara birokrat dan budayawan. Kalau sudah begitu, ujung-ujungnya pasti tidak jauh dari soal alokasi anggaran.

LAGU baru, baik yang merdu maupun yang sumbang, mungkin mesti dicari di tempat lain. Untuk menyimaknya, orang dapat keluar dari dinding kantor pemerintah, atau sedikit melintasi pagar identitas serta etnisitas. Meski orang harus awas terhadap bias kota besar dalam upaya memandang kebudayaan, gejala-gejala mutakhir di wilayah urban tampaknya memberikan harapan tersendiri bagi pengembangan adaptabilitas kebudayaan lokal terhadap perubahan global.

Di kota besar seperti Bandung, yang baru dan yang lama, yang mutakhir dan yang purba, sesungguhnya hadir bersama, bahkan tumpuk-menumpuk di satu ruang. Apa yang disebut “budaya dominan” (*dominant culture*), “budaya residual” (*residual culture*), dan “budaya baru” (*emerging culture*)---untuk meminjam istilah Raymond Williams---tampak tumpang tindih. Bukankah jarak antara Sumur Bandung dan Jalan Braga dekat sekali?

Di jalan raya muncul konvoi Brotherhood MC. Kelompok penggemar motor besar warisan Perang Dunia II ini juga memprakarsai festival reog mato di Situraja, Sumedang. Muncul pula iring-iringan Viking, bobotoh Persib yang juga promotor ungkapan-ungkapan Sunda seperti “Persib Aing”, “Wasit Goblog”, dsb. Dari spanduk politisi hingga kaos oblong produk Mahanagari, sedikit banyak, terdapat kandungan “nilai-nilai budaya Sunda”.

Pasar juga menyediakan peluang serupa. Di sebuah mal baru di Dago ada reklame telepon seluler yang memakai bahasa Sunda: “hapena hade pisan, *facebook* oge tiasa”. Reklame sejenis juga terdapat di salah satu perempatan di Jl Soekarno-Hatta, yang berbunyi: “Hoyong lancar? Mangga tarik tunai atau transfer wae di ATM...”

Dalam penyelenggaraan perhelatan (*event organizing*) semisal Helarfest warna-warni kultural seperti itu, sedikit banyak, terepresentasikan. Dalam Helarfest 2009, misalnya, di antara program-program pertunjukan yang disajikan terdapat musik karinding (Karinding Markifat) dan calung yang disenyawakan dengan *punk* (*punklung*), yang saling mengisi dengan bentuk-bentuk kesenian “kontemporer”. Tajuk acara itu sendiri mengingatkan orang pada *helaran* dalam tradisi Sunda. Perhelatan sejenis, semisal yang diselenggarakan Republic Entertainment, sering juga merengkuh bentuk-bentuk kesenian Sunda dalam penyelenggaraannya.

Dengan kata lain, bentuk-bentuk kesenian *buhun* bukannya tidak punya tempat di kota. Ronggeng Gunung dari Ciamis, misalnya, belakangan sering diundang ke Bandung, tak terkecuali di kampus UPI. Bahkan bentuk-bentuk permainan anak-anak Sunda, sebagaimana yang konservasinya diupayakan oleh Yayasan Hong, belakangan turut mengisi keriaan di Tegallega.

Musik dan seni pertunjukan memperlihatkan adaptabilitas yang menarik, bahkan mampu menebarkan pesona ke tempat-tempat yang jauh dari sini. Penari topeng Indramayu Wangi Indriya menari di Inggris. Adapun kelompok musik Samba Sunda pimpinan Ismet Ruchimat bukan hanya mampu mensenyawakan karawitan Sunda dengan warna-warni musik lainnya, melainkan juga mampu mencapai reputasi internasional, termasuk penampilannya dalam program BBC 3 di London pada 2003.

Di bidang konservasi alam Tatar Sunda, upaya-upaya elemen masyarakat sipil sejauh ini menarik pula dicatat. Sebut, misalnya, “Geotrek” yang dipromosikan T.

Bachtiar dan kawan-kawan, khususnya dari Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB). Hingga batas tertentu, “geotrek” itu seakan meneruskan jalur-jalur *excursie* yang pada 1930-an kerap dipromosikan melalui majalah *Mooi Bandung*. Namun, di tangan Bachtiar dkk., jalur-jalur wisata alam menjadi medium yang efektif untuk menggugah kesadaran kolektif akan pentingnya memelihara alam hayati tempat tumbuhnya kebudayaan Sunda itu sendiri. Bachtiar juga aktif memproduksi narasi mengenai domain-domain geografis dan geologis yang kelangsungan hidupnya tengah dilanda krisis.

Itulah sejumlah gejala pokok yang terasa membersihkan harapan di tengah kemandekan wacana dan perbincangan kebudayaan lokal.

AKHIRNYA, evaluasi seperti ini kiranya perlu diarahkan pada upaya menjawab tuntutan ruang global yang kian mempengaruhi kebudayaan lokal di berbagai penjuru bumi. Dalam hal ini, orang dapat menempuh upaya yang oleh Homi K. Bhabha dalam bukunya, *The Location of Culture* (1994), dideskripsikan sebagai “menggeser lokasi perbedaan kultural dari ranah *pluralitas* demografis ke arah negosiasi lintas batas dalam translasi kultural” (hal. 223)

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah menyediakan “jalan besar”, terutama dalam bentuk jejaring maya yang jauh lebih besar dan lebih berliku daripada *groot postweg* warisan Daendels. Kebudayaan Sunda, sebagaimana kebudayaan dari beragam lingkungan lain, sepatutnya dapat menempatkan diri atau ditempatkan di jalan itu. Ungkapan lama “*ngindung ka waktu ngabapa ka mangsa*” kiranya dapat diaktualkan dengan cara itu.

Pagar-pagar politik identitas, juga sekat-sekat etnisitas, mau tidak mau mesti dilampaui untuk memungkinkan “translasi kultural” (*cultural translations*). Globalisasi tidak perlu selalu dilihat sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup budaya lokal. Globalisasi juga dapat dilihat sebagai peluang lapang bagi pemberdayaan budaya lokal.

Dalam kerangka tuntutan ruang global, nasionalisme, tak terkecuali nasionalisme etnis, justru dapat menghambat adaptabilitas budaya lokal terhadap globalisasi. Setidaknya, sikap ngotot dengan “identitas budaya” malah bisa mengancam kemerdekaan individual untuk membuat keputusan dalam hidupnya.

Untuk menutup catatan singkat ini, baik kita kutip pandangan penulis Spanyol Mario Vargas Llosa. “Kebijakan terbaik untuk menjaga bahasa dan kebudayaan tiap orang adalah menyebarkanluarkannya ke berbagai penjuru Bumi, ketimbang secara naif berupaya melindungi bahasa dan kebudayaan itu dari infeksi bahasa Inggris,” tulis Llosa dalam “Local Culture and Globalization” (<http://www.trilateral.org/annmtgs/trialog/trlgtxts/t54/var.htm>).***

Penulis, dosen dan penulis lepas, tinggal di Bandung